

EVALUASI ALOKASI BANTUAN PENDIDIKAN DI KAMPUNG YUABAN SATU DISTRIK TERAPLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

SITI FATIMAH, YULIATI KALA'PADANG, SANTRIO KAMALUDDIN,
RHINA PONGTULURAN

ABSTRAK

Suatu kajian mengenai Evaluasi Alokasi Bantuan Pendidikan di Kampung Yuaban Satu Distrik Teraplu Kabupaten Pegunungan Bintang, merupakan suatu kajian deskriptif dengan instrument utama interview terhadap sejumlah informan terutama para pegawai di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu serta perwakilan dari masyarakat, dengan focus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan proses bantuan pendidikan dengan sumber dana dari alokasi dana desa/kampong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Topic evaluasi dalam hal ini sudah sangat jelas, dimana setiap kegiatan selesai dilaksanakan kita harus evaluasi untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilannya, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah, dalam rencana kerja semua program termasuk program bantuan pendidikan yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan evaluasinya paling lambat 14 hari setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Kegiatan evaluasi pada dasarnya mengacu pada prinsip evaluasi suatu program, dimana setelah program tersebut dilaksanakan, maka tahapan berikutnya melihat sejauhmana kesesuaian program tersebut dengan perencanaan serta bagaimana capaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa proses evaluasi suatu program dilakukan paling lambat 14 hari dari pelaksanaan program kerja tersebut dan sudah ditentukan pihak-pihak mana yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut, salah satunya dengan mengundang salah seorang pegawai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Pengumpulan data adalah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan serta mencatat tiap-tiap informasi itu sesuai dengan perencanaan dengan berdasarkan ketentuan yang ada, selanjutnya temuan tersebut akan dikonfirmasi pada pihak pelaksana agar para pelaksana mengklarifikasi. Dari program tersebut memang banyak laporan dari masyarakat penerima bahwa pelaksanaan atau besaran dana bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hal tersebut disebabkan jumlah pengusul bertambah karena ada beberapa yang pada awal penetapan tidak hadir, namun setelah program siap dijalankan ada pengajuan baru, data-data tersebut perlu dikumpulkan secara baik sebagai bahan dalam pembahasan evaluasi dan monitoring program. Pelaporan hasil evaluasi yaitu membuat laporan hasil evaluasi supaya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berisikan temuan-temuan dilapangan serta koreksi dan rujukan berupa tindakan perbaikan atau klarifikasi lebih lanjut, pendamping program memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggung jawaban atas program yang kami damping pelaksanaannya, dan hal tersebut berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bahwa laporan pertanggung jawaban disusun setelah 1 minggu atau 7 hari kegiatan tersebut dilaksanakan, hal tersebut sudah dilaksanakan dan laporannya kami serahkan kepada Kepala Kampung yang nantinya akan disampaikan ke Distrik sebagai bahan laporan

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fenomena-fenomena di masa lalu telah melahirkan konsep pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang. Pembangunan yang cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (top-down) kini mulai diminimalkan, dan muncul konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (community based development), yang bersifat bottom up dan menggunakan pendekatan lokalitas

yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar (Zubaedi, 2007:10). Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah kampung adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah kampung merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Kampung berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah : "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pada tahun 2019 Alokasi Dana untuk biaya pendidikan dicairkan pada bulan Agustus adalah sebesar Rp. 250,675,67 . Untuk biaya pendidikan tetapi sebagai Mahasiswa dan anak sekolah yang tidak dapat maka itu Penulis ingin mengetahui dan meneliti mengenai Alokasi dana kampung tahun 2019 di kampung Yuaban satu berdasarkan masalah tersebut mengambil judul. " Evaluasi Alokasi Bantuan Pendidikan di Kampung Yuaban Satu Distrik Teraplu Kabupaten Pegunungan Bintang Penulis memutuskan untuk mengambil judul tersebut karena, penulis melihat bahwa program ini perlu dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diberikan dari anggaran ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan perumusan masalah, yaitu: Evaluasi Alokasi Bantuan Pendidikan di Kampung Yuaban Satu Distrik Teraplu Kabupaten Pegunungan Bintang ?

C. Tujuan Penelitian

Kebijakan Pemerintah kampung Yuaban Satu kebijakan untuk biaya pendidikan pada tahun 2019. Tujuan dari pada Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Evaluasi Alokasi Bantuan Pendidikan di Kampung Yuaban Satu Distrik Teraplu Kabupaten Pegunungan Bintang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1 Evaluasi

Apa yang dimaksud dengan evaluasi (*evaluation*)? Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/ menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan

Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja. Adapun beberapa

informasi yang didapatkan dari proses evaluasi adalah sebagai berikut: Tingkat kemajuan suatu kegiatan, Tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya dan Hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang.

Evaluasi menurut Jones (1984:199) dalam Ismi Dwi Astuti (2006:55) adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan. Evaluasi menurut Abdillah Hanafi dan Mulyadi Guntur (1984: 16) adalah penilaian terhadap suatu persoalan dan umumnya menunjuk pada baik buruknya persoalan tersebut. Dalam hal ini penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program, seberapa besar efek yang ditimbulkan, dan seberapa tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui seberapa besar manfaatnya terhadap sasaran program. Dan juga sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut untuk program itu dan peningkatan program dimasa mendatang.

Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilakukan bukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan ini. Secara khusus, adapun beberapa tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching.
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

a. Fungsi Evaluasi

Kegiatan evaluasi memiliki beberapa fungsi yang bermanfaat bagi pihak yang melakukan evaluasi maupun pihak yang dievaluasi. Adapun beberapa fungsi evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Selektif, adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya; menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lainnya.
- 2) Fungsi Diagnosa, bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu.

Misalnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah.

- 3) Fungsi Penempatan, bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Misalnya untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan.
- 4) Fungsi Pengukuran Keberhasilan, Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan.

b. Tahapan Evaluasi

Dalam kegiatan evaluasi terdapat beberapa tahapan penting yang saling mendukung satu sama lainnya. Mengacu pada pengertian evaluasi, adapun tahapan-tahapan evaluasi menurut Hayat (2018;73) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik evaluasi, yaitu kegiatan penentuan topik yang akan dievaluasi. Misalnya; evaluasi hasil kerja, atau evaluasi rencana kerja.
2. Merancang kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan mendesain proses evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal yang penting.
3. Pengumpulan data, yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.
4. Pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan mengolah informasi dengan cara mengelompokkan data agar lebih mudah dalam melakukan analisis, serta menentukan tolak ukur waktu sebagai hasil evaluasi.
5. Pelaporan hasil evaluasi, yaitu membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa:

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- 5) Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2. Dana Desa.

Dana secara langsung menunjukkan konsisten pemerintah dalam komitmen terhadap pembangunan, tiap tahunnya pemerintah memberikan dana desa yang semakin tinggi. Dana tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau mutu desa dengan adanya peningkatan sarana dan infrastruktur pembangunan desa, yang mana akan mensejahterakan masyarakat desa itu juga.

Penyaluran dana desa ke setiap desa, merupakan suatu bentuk penerapan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang mana, bertujuan untuk memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh tanah air Indonesia, juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

3. Pengertian Dana desa

Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar

prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa, Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa, Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan menekankan pada subjek pembangunan di pedesaan.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

5. Manfaat Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tujuan Pengelolaannya Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Lebih lanjut Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam PP No. 72/2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan Desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa”. Berdasarkan Peraturan tersebut, tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

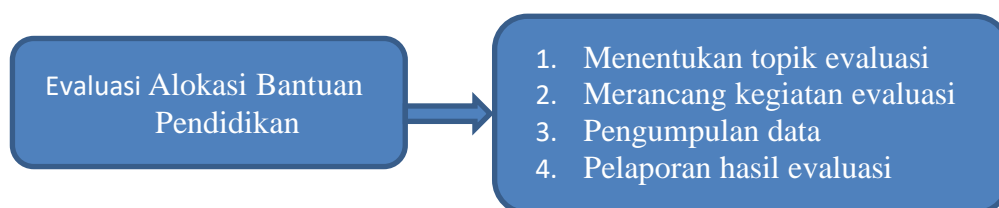
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat. Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggung jawabannya.

Konsep Pembangunan Desa Pemahaman tentang Pembangunan Ditinjau dari tujuan-tujuannya, pembangunan adalah pengharapan akan kemajuan dalam social serta ekonomi dan untuk mana setiap negara mempunyai pandangan maupun nilai-nilai yang berlainan mengenai apa yang dimaksud dengan di “harapkan” itu. Makna Pembangunan Desa Pembangunan masyarakat desa (pedesaan) adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisikondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe dan dasar Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha menggambarkan kenyataan yang terjadi mengenai sebuah fenomena sosial yang terjadi pada kelompok tertentu, yaitu tentang kemanfaatan program Biaya pendidikan di kampung Yuaban satu. Hal ini dilihat dari perubahan yang mereka alami setelah implementasi program tahap pertama dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan data kualitatif, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata atau kalimat dari para responden atau perilaku yang diamati.

B Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada Apartuar Pemerintahan Kampung Yuaban satu, Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat Kampung Yuaban satu. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan : Menentukan topik evaluasi, Merancang kegiatan evaluasi, Pengumpulan data, dan Pelaporan hasil evaluasi.

C. Informan

Informasi yang dipilih dalam penelitian ini peneliti tentukan adalah sebagai berikut: Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, Pendamping Program dan Tokoh Pemuda

D Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data Primer dan Data Sekunder

E Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model analisis interaktif. Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo (2002 : 94-96) menyebutkan ada tiga komponen pokok dalam penelitian ini, yaitu: Reduksi Data, Sajian Data dan Penarikan Simpulan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan focus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti akan mencoba memaparkan hasil temuan dilapangan berkaitan dengan hal-hal seperti berikut di bawah ini:

1. Menentukan topik evaluasi

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah mengenai penentuan topic evaluasi, yaitu kegiatan penentuan topik yang akan dievaluasi. Misalnya; evaluasi hasil kerja, atau evaluasi rencana kerja. Dalam hal ini kita akan melihat sejauhmana evaluasi dari perencanaan program bantuan pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh informasi dilapangan dari kepala kampung Yuaban Satu, yaitu sebagai berikut: *Bahwa bicara tentang topik evaluasi dalam hal ini sudah sangat jelas, dimana setiap kegiatan selesai dilaksanakan kita harus evaluasi untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilannya, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah atau para pemuda yang melanjutkan studi pada jenjang perguruan tinggi perlu dilakukan evaluasi agar jelas capaian dari program tersebut serta untuk melihat sejauhmana ketepatan sasaran program tersebut.* (wawancara dilakukan di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu, pada tanggal 20 Desember 2020)

Selanjutnya peneliti juga memperoleh informasi dari Pendamping Program mengenai bantuan pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut: *Topik evaluasi sudah ditetapkan bahkan dijadwalkan dalam rencana kerja semua program termasuk program bantuan pendidikan yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan evaluasinya paling lambat 14 hari setelah program tersebut selesai dilaksanakan, hal tersebut berdasarkan pada ketetapan pemerintah daerah kabupaten Pegunungan Bintang yang berlaku bagi semua kampung penerima program tersebut.* (wawancara dilakukan di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu, pada tanggal 20 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, berkaitan dengan sejauhmana evaluasi program bantuan pendidikan dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaannya, maka dapat dipaparkan bahwa topic evaluasi dalam hal ini sudah sangat jelas, dimana setiap kegiatan selesai dilaksanakan kita harus evaluasi untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilannya, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah, dalam rencana kerja semua program termasuk program bantuan pendidikan yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan evaluasinya paling lambat 14 hari setelah program tersebut selesai dilaksanakan, hal tersebut berdasarkan pada ketetapan pemerintah daerah kabupaten Pegunungan Bintang yang berlaku bagi semua kampung penerima program tersebut

2. Merancang kegiatan evaluasi,

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah tentang Merancang kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan mendesain proses evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal yang penting, artinya disini menganalisa sejauhmana kegiatan evaluasi tentang bantuan dana pendidikan terfokus secara khusus pada permasalahan tersebut, sehingga hasil evaluasi dapat maksimal.

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh informasi dilapangan dari kepala kampung Yuaban Satu, yaitu sebagai berikut: *Kegiatan evaluasi pada dasarnya mengacu pada prinsip evaluasi suatu program, dimana setelah program tersebut dilaksanakan, maka tahapan berikutnya melihat sejauhmana kesesuaian program tersebut dengan perencanaan serta bagaimana capaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, dimana evaluasi dilakukan dengan melihat secara langsung pada saat program tersebut dilaksanakan.* (wawancara dilakukan di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu, pada tanggal 20 Desember 2020).

Selanjutnya peneliti juga memperoleh informasi dari Pendamping Program mengenai bantuan pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut: *Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa proses evaluasi suatu program dilakukan paling lambat 14 hari dari pelaksanaan program kerja tersebut dan sudah ditentukan pihak-pihak mana yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut, salah satunya dengan mengundang salah seorang pegawai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai tenaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program tersebut.* (wawancara dilakukan di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu, pada tanggal 20 Desember 2020).

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut di atas, maka untuk indicator ini diperoleh gambaran bahwa Kegiatan evaluasi pada dasarnya mengacu pada prinsip evaluasi suatu program, dimana setelah program tersebut dilaksanakan, maka tahapan berikutnya melihat sejauhmana kesesuaian program tersebut dengan perencanaan serta bagaimana capaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa proses evaluasi suatu program dilakukan paling lambat 14 hari dari pelaksanaan program kerja tersebut dan sudah ditentukan pihak-pihak mana yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut, salah satunya dengan mengundang salah seorang pegawai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai tenaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program tersebut

3. Pengumpulan data,

Indikator yang ketiga dalam penelitian ini adalah tentang **Pengumpulan data** yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Hal ini artinya bahwa perlunya penelusuran sebagai bahan menyusun data yang sesuai berkaitan dengan siapa dan seberapa besar program bantuan pendidikan yang dilaksanakan dapat diperoleh masyarakat pelajar pada wilayah penelitian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh informasi dilapangan dari kepala kampung Yuaban Satu, yaitu sebagai berikut: *Pengumpulan data adalah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan serta mencatat tiap-tiap informasi itu sesuai dengan perencanaan dengan berdasarkan ketentuan yang ada, selanjutnya temuan tersebut akan dikonfirmasi pada pihak pelaksana agar para pelaksana mengklarifikasi atas temuan tersebut dan apabila terbukti benar, maka tahap berikutnya adalah mencari solusi secara bersama atas kekeliruan yang terjadi pada saat pelaksanaan program tersebut.* (wawancara dilakukan di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu, pada tanggal 20 Desember 2020).

Selanjutnya peneliti juga memperoleh informasi dari Tokoh Masyarakat mengenai bantuan pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut: *Dari program tersebut memang banyak laporan dari masyarakat penerima bahwa pelaksanaan atau besaran dana bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hal tersebut disebabkan jumlah pengusul bertambah karena ada beberapa yang pada awal penetapan tidak hadir, namun setelah program siap dijalankan ada pengajuan baru, data-data tersebut perlu dikumpulkan secara baik sebagai bahan dalam pembahasan evaluasi dan monitoring program.*

(wawancara dilakukan di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu, pada tanggal 20 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran mengenai sejauhmana pengumpulan data dapat mempermudah proses evaluasi dan monitoring program dapat dipaparkan bahwa Pengumpulan data adalah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan serta mencatat tiap-tiap informasi itu sesuai dengan perencanaan dengan berdasarkan ketentuan yang ada, selanjutnya temuan tersebut akan dikonfirmasi pada pihak pelaksana agar para pelaksana mengklarifikasi. Dari program tersebut memang banyak laporan dari masyarakat penerima bahwa pelaksanaan atau besaran dana bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hal tersebut disebabkan jumlah pengusul bertambah karena ada beberapa yang pada awal penetapan tidak hadir, namun setelah program siap dijalankan ada pengajuan baru, data-data tersebut perlu dikumpulkan secara baik sebagai bahan dalam pembahasan evaluasi dan monitoring program

4. Pelaporan hasil evaluasi,

Indikator terakhir dalam penelitian ini adalah tentang **Pelaporan hasil evaluasi** yaitu membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau melihat sejauhmana laporan dari kegiatan pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut sesuai dengan fakta lapangan atau keadaan sebenarnya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana program atau pemerintah kampung Yuaban Satu.

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh informasi dilapangan dari kepala kampung Yuaban Satu, yaitu sebagai berikut: *Pelaporan hasil evaluasi yaitu membuat laporan hasil evaluasi supaya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berisikan temuan-temuan dilapangan serta koreksi dan rujukan berupa tindakan perbaikan atau klarifikasi lebih lanjut sebagai bahan untuk melakukan revisi pelaporan agar sesuai dengan perundangan atau rencana awal program tersebut.* (wawancara dilakukan di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu, pada tanggal 20 Desember 2020).

Selanjutnya peneliti juga memperoleh informasi dari Pendamping Program mengenai pelaporan hasil program bantuan pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut: *Kami selaku pendamping program memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggung jawaban atas program yang kami damping pelaksanaannya, dan hal tersebut berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bahwa laporan pertanggung jawaban disusun setelah 1 minggu atau 7 hari kegiatan tersebut dilaksanakan, hal tersebut sudah*

dilaksanakan dan laporannya kami serahkan kepada Kepala Kampung yang nantinya akan disampaikan ke Distrik sebagai bahan laporan. (wawancara dilakukan di kantor Kepala Kampung Yuaban Satu, pada tanggal 20 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dalam hal pelaporan hasil evaluasi diperoleh gambaran bahwa Pelaporan hasil evaluasi yaitu membuat laporan hasil evaluasi supaya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berisikan temuan-temuan dilapangan serta koreksi dan rujukan berupa tindakan perbaikan atau klarifikasi lebih lanjut, pendamping program memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggung jawaban atas program yang kami damping pelaksanaannya, dan hal tersebut berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bahwa laporan pertanggung jawaban disusun setelah 1 minggu atau 7 hari kegiatan tersebut dilaksanakan, hal tersebut sudah dilaksanakan dan laporannya kami serahkan kepada Kepala Kampung yang nantinya akan disampaikan ke Distrik sebagai bahan laporan

B. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil analisa dan interpretasi data di atas, maka pada bagian ini peneliti akan mencoba memaparkan lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal seperti berikut di bawah ini:

1. Menentukan topik evaluasi

Penentuan topik evaluasi, yaitu kegiatan penentuan topik yang akan dievaluasi. Misalnya; evaluasi hasil kerja, atau evaluasi rencana kerja. Dalam hal ini kita akan melihat sejauhmana evaluasi dari perencanaan program bantuan pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Evaluasi merupakan salah satu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja. Informasi yang didapatkan dari sebuah proses evaluasi yaitu sebagai berikut :Tingkat kemajuan suatu kegiatan, Tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya. Dan Hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang.

2. Merancang kegiatan evaluasi,

Merancang kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan mendesain proses evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal yang penting, artinya disini menganalisa sejauhmana kegiatan evaluasi tentang bantuan dana pendidikan terfokus secara khusus pada

permasalahan tersebut, sehingga hasil evaluasi dapat maksimal.

Tujuan Evaluasi adalah Untuk bisa mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, Untuk dapat mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga bisa dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedia teaching, Untuk mengetahui suatu tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan dan Sebagai salah satu umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

3. Pengumpulan data,

Pengumpulan data yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Hal ini artinya bahwa perlunya penelusuran sebagai bahan menyusun data yang sesuai berkaitan dengan siapa dan seberapa besar program bantuan pendidikan yang dilaksanakan dapat diperoleh masyarakat pelajar pada wilayah penelitian tersebut.

Guba dan Lincoln (1985 : 35), mendefinisikan evaluasi sebagai “ a process for describing an evaluand and judging its merit and worth”. (suatu proses untuk menggambarkan evaluasi (orang yang dievaluasi) dan menimbang makna dan nilainya). Sax (1980 : 18) juga berpendapat “evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator”. (evaluasi adalah suatu proses dimana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator). Dari dua rumusan tentang evaluasi ini, dapat kita peroleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Berdasarkan pengertian ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami lebih lanjut, yaitu :

Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas daripada sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. S. Hamid Hasan (1988 : 14-15) secara tegas membedakan kedua istilah tersebut sebagai berikut : Pemberian nilai dilakukan apabila seorang evaluator memberikan pertimbangannya mengenai evaluasi tanpa menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat dari luar. Jadi pertimbangan yang diberikan sepenuhnya berdasarkan apa evaluasi itu sendiri.

Sedangkan arti, berhubungan dengan posisi dan peranan evaluasi dalam suatu konteks tertentu. Tentu saja kegiatan evaluasi yang komprehensif adalah yang meliputi baik proses pemberian keputusan tentang nilai dan proses keputusan tentang arti, tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu kegiatan evaluasi harus selalu meliputi keduanya. Pemberian nilai dan arti ini dalam bahasa yang dipergunakan Scriven (1967) adalah formatif dan sumatif. Jika formatif dan sumatif merupakan fungsi evaluasi, maka nilai dan arti adalah hasil kegiatan yang dilakukan oleh evaluasi.

Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (judgement). Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti (worth and merit) dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan, suatu kegiatan bukanlah termasuk kategori kegiatan evaluasi.

Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. Kriteria yang digunakan dapat saja berasal dari apa yang dievaluasi itu sendiri (internal), tetapi bisa juga berasal dari luar apa yang dievaluasi (eksternal), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jika yang dievaluasi itu adalah proses pembelajaran, maka kriteria yang dimaksud bisa saja dikembangkan dari karakteristik proses pembelajaran itu sendiri, tetapi dapat pula dikembangkan kriteria umum tentang proses pembelajaran. Kriteria ini penting dibuat oleh evaluator dengan pertimbangan (a) hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (b) evaluator lebih percaya diri (c) menghindari adanya unsur subjektivitas (d) memungkinkan hasil evaluasi akan sama sekalipun dilakukan pada waktu dan orang yang berbeda, dan (e) memberikan kemudahan bagi evaluator dalam melakukan penafsiran hasil evaluasi.

Kriteria sangat diperlukan untuk menentukan pencapaian indikator hasil belajar peserta didik yang sedang diukur. Dalam pengembangan kriteria untuk menentukan kualitas jawaban peserta didik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain (a) kriteria harus meluas tetapi tidak memakan waktu, sehingga sulit dilaksanakan (b) dapat dipahami dengan jelas oleh peserta didik, orang tua dan guru (c) mencerminkan keadilan, dan (d) tidak merefleksikan variabel yang bias, latar belakang budaya, sosioekonomi, ras dan gender.

4. Pelaporan hasil evaluasi,

Pelaporan hasil evaluasi yaitu membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, atau melihat sejauhmana laporan dari kegiatan pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut sesuai dengan fakta lapangan atau keadaan sebenarnya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana program atau pemerintah kampung Yuaban Satu.

Jenis – Jenis Evaluasi adalah Evaluasi Formatif, Evaluasi formatif ialah suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja. Umumnya, waktu pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan secara rutin perbulan atau per tahun

Sesuai dengan keperluan informasi hasil penilaian. Manfaatnya, memberikan umpan balik kepada manajer program terkait kemajuan hasil yang telah dicapai serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi selama berlangsungnya suatu kegiatan atau program kerja tersebut.

Evaluasi Sumatif, Evaluasi sumatif yaitu sebuah penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja, secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan hasil evaluasi ini sendiri diadakan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh suatu kegiatan atau program kerja.

Fungsi Evaluasi terbagi kedalam dua fungsi secara garis besar yaitu Fungsi Selekti ialah salah satu fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, fungsi Diagnosa yang bertujuan untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu, Fungsi Penempatan bertujuan untuk dapat mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu dan Fungsi Pengukuran Keberhasilan, Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk bisa mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan.

V. KESIMPULAN

1. Topic evaluasi dalam hal ini sudah sangat jelas, dimana setiap kegiatan selesai dilaksanakan kita harus evaluasi untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilannya, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah, dalam rencana kerja semua program termasuk program bantuan pendidikan yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan evaluasinya paling lambat 14 hari setelah program tersebut selesai dilaksanakan.
2. Kegiatan evaluasi pada dasarnya mengacu pada prinsip evaluasi suatu program, dimana setelah program tersebut dilaksanakan, maka

tahapan berikutnya melihat sejauhmana kesesuaian program tersebut dengan perencanaan serta bagaimana capaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa proses evaluasi suatu program dilakukan paling lambat 14 hari dari pelaksanaan program kerja tersebut dan sudah ditentukan pihak-pihak mana yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut, salah satunya dengan mengundang salah seorang pegawai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Pengumpulan data adalah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan serta mencatat tiap-tiap informasi itu sesuai dengan perencanaan dengan berdasarkan ketentuan yang ada, selanjutnya temuan tersebut akan dikonfirmasi pada pihak pelaksana agar para pelaksana mengklarifikasi. Dari program tersebut memang banyak laporan dari masyarakat penerima bahwa pelaksanaan atau besaran dana bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hal tersebut disebabkan jumlah pengusul bertambah karena ada beberapa yang pada awal penetapan tidak hadir, namun setelah program siap dijalankan ada pengajuan baru, data-data tersebut perlu dikumpulkan secara baik sebagai bahan dalam pembahasan evaluasi dan monitoring program
4. Pelaporan hasil evaluasi yaitu membuat laporan hasil evaluasi supaya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berisikan temuan-temuan dilapangan serta koreksi dan rujukan berupa tindakan perbaikan atau klarifikasi lebih lanjut, pendamping program memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggung jawaban atas program yang kami damping pelaksanaannya, dan hal tersebut berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bahwa laporan pertanggung jawaban disusun setelah 1 minggu atau 7 hari kegiatan tersebut dilaksanakan, hal tersebut sudah dilaksanakan dan laporannya kami serahkan kepada Kepala Kampung yang nantinya akan disampaikan ke Distrik sebagai bahan laporan

VI. DAFTAR PUSAKA

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Perencanaan SDM : Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Panuju, Redi. 2001. *Komunikasi Organisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dasar Teori dan Terapan Dalam Penelitian*, Surakarta : UNS Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.